

Berikut contoh soal tes tes tulis PPK pemilu 2024 beserta jawabannya

1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum

E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban A

2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu

D. menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat

E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban D

3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja

B. 15 (lima belas) hari kerja

C. 14 (empat belas) hari kerja

D. 7 (tujuh) hari kerja

E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

4. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...

A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. Semua Jawaban Salah.

Jawaban D

5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

A. 17 Februari 2024

B. 15 Februari 2024

C. 14 Februari 2024

D. 13 Februari 2024

E. 18 Februari 2024

Jawaban C

6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

- A. Pasal 5 ayat 3
- B. Pasal 9 ayat 2
- C. Pasal 9 ayat 1
- D. Pasal 1 ayat 5
- E. Pasal 2 ayat 1

Jawaban C

7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

- A. 9-7-5-5-3
- B. 11-7-5-5-3
- C. 7/5-5/7-5-5-5
- D. 9-5/3-5-5-3
- E. 7-5/7-3/5-5/3

Jawaban E

8. Apa kepanjangan dari PPK?

- A. Petugas Pemungutan Kecamatan
- B. Panitia Pemungutan Kecamatan
- C. Petugas Pemilihan Kecamatan
- D. Panitia Pemilihan Kecamatan
- E. Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban D

9. PPK berkedudukan di mana?

- A. Kantor Kecamatan
- B. Kantor Polsek Kecamatan
- C. Pendopo Kecamatan
- D. Ibukota Kecamatan
- E. Ibu kota desa/kelurahan

Jawaban D

10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?

- A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan

pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum

penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan

pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu

dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan

pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Jawaban A

11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:

A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri

atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan

kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Jawaban : B

12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

- A. 1 bulan
- B. 2 bulan
- C. 3 bulan
- D. 4 bulan
- E. 5 bulan

Jawaban B

13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat

- A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat ad hoc
- B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu bersifat ad hoc
- C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc
- D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat ad hoc
- E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc

Jawaban D

14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan

- A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
- B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
- C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
- E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jawaban C

15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh

- A. Dengan Kehormatan KPU
- B. Dewan Kehormatan Bawaslu
- C. Dewan Kode Etik KPU
- D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu

Jawaban D

16. Ketua Bawaslu saat ini adalah

- A. Totok Haryono, SH
- B. Dr. Herwyn Jeller Hielsa M, M.H
- C. Puadi, S.Pd, MM
- D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
- E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Jawaban E

17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

- A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu

- B. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- C. masa kampanye pemilu
- D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
- E. penetapan hasil pemilu

Jawaban D

18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat..... bulan sebelum hari pemungutan suara

- A. 24
- B. 25
- C. 22
- D. 20
- E. 21

Jawaban D

19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan

- A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
- B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
- C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
- D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
- E. Mengubah hasil perhitungan suara

Jawaban E

20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?

- A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
- B. KPU Bawaslu dan partai politik
- C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik

- D. KPU dan Bawaslu
- E. KPU Bawaslu dan tim kampanye

Jawaban D

21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara

- A. 18
- B. 20
- C. 22
- D. 19
- E. 25

Jawaban A

22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyakkursi

- A. 352
- B. 445
- C. 350
- D. 577
- E. 575

Jawaban E

23. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit kursi dan paling banyak kursi

- A. 20 dan 35
- B. 20 dan 45
- C. 20 dan 55
- D. 25 dan 55
- E. 35 dan 75

Jawaban C

24. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 2

Jawaban B

25. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh

- A. Pantarlih
- B. PPS
- C. PPK
- D. KPU Kabupaten/Kota
- E. semua jawaban benar

Jawaban B

26. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selamantuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat

- A. 17 hari
- B. 10 hari
- C. 14 hari
- D. 15 hari
- E. 20 hari

Jawaban C

27. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

- A. 25%
- B. 20%
- C. 4%
- D. 10%
- E. 15%

Jawaban B

28. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali.....

- A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru

B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR

- D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
- E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota

Jawaban B

29. Hai kampanye pemilu dapat dilakukan melalui

- A. pertemuan terbatas
- B. pertemuan tatap muka
- C. pemasangan alat peraga di tempat umum
- D. rapat umum
- E. Semua jawaban Benar

Jawaban E

30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah

- A. pertemuan terbatas
- B. pertemuan tatap muka
- C. penyebaran bahan kampanye kepada umum
- D. pemasangan alat peraga di tempat umum
- E. semua jawaban benar

Jawaban E

31. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:

- A. Langsung
- B. Umum
- C. Bebas
- D. Rahasia
- E. Jujur dan Adil

Jawaban C

32. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...

- A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
- B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban E

33. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh.....

- A. KPU Kabupaten/Kota
- B. KPU RI
- C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- D. KPPS
- E. PPS

Jawaban A

34. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali ...

- A. Warga Negara Indonesia
- B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
- C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
- D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Jawaban B

35. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...

- A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
- B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
- D. Menentukan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)

Jawaban C

36. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh ...

- A. Pantarlih
- B. Pantarlih dan PPS
- C. Pantarlih, PPS, dan PPK
- D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
- E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu

Jawaban C

37. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:

- A. Undang-Undang Dasar
- B. Undang-Undang
- C. Peraturan Pemerintah
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
- E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Jawaban B

38. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?

- A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
- C. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
- D. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
- E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum

Jawaban A

39. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:

- A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
- B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
- C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
- D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
- E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan

Jawaban B

40. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama...

- A. 30 (tiga puluh) hari kerja
- B. 15 (lima belas) hari kerja
- C. 14 (empat belas) hari kerja
- D. 7 (tujuh) hari kerja
- E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

41. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali:

- A. Kepala Desa
- B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- C. Perangkat Desa
- D. Lembaga Swadaya Masyarakat
- E. Tenaga Pendamping Desa

Jawaban no 41 dengan pembahasan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 64 huruf (h) yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan: “.... Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.”

Jadi untuk jawaban no 41 adalah D.